

PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN MENENGAH BERORIENTASI KEADILAN DI KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

Suroso

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati
e-mail: surosopati321@gmail.com

Abstract: Education is very important to develop human resources. The objective of this study is to analyze the development policy for access equity of secondary education. This research uses descriptive-quantitative approach. The data consist of primary and secondary ones. Data collecting is conducted by using observation and interview. The analysis of data uses descriptive one. There are 3 findings in the research. Firstly, the distribution of secondary education development in the study area is less equally. Secondly, the district which becomes a priority of secondary education development is the district which has the smallest ratio between proportion of existing secondary education toward proportion of population. Thirdly, the most potential site for the secondary education development oriented to optimization accessibility is the site in the centre by incorporating geographical factor and population. However, selecting a land of the site for secondary education development should meet the normative standards in the regulation.

ملخص: إن التربية مهمة لتطوير الموارد البشرية. حاول هذا البحث تحليل قرار تعميم الحصول على التربية في المرحلة المتوسطة. واستخدم هذا البحث المدخل الوصفي الكيفي. وتشتمل بيانات البحث على البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. وهذه البيانات تُجمع عن طريق الملاحظة والمقابلة. أما طريقة تحليلها فبالتحليل الوصفي. حصل الباحث على نتائج البحث، أولاً: إن تعميم البناء التربوي للمرحلة المتوسطة في موضع البحث لم يكن شاملاً للجميع، ثانياً: إن المنطقة كالمهدف للبناء التربوي للمرحلة المتوسطة لها اتجاه للعدالة، هي المنطقة التي لها نسبة أصغر بين نسبة وجود التربية للمرحلة المتوسطة تجاه نسبة المواطنين، وثالثاً: المنطقة الممكنة للبناء التربوي للمرحلة المتوسطة المتجه إلى التعميم التربوي هي المنطقة الوسطى باعتبار الموقع الجغرافي والمواطنين. ولكن اختيار المكان للبناء التربوي للمرحلة المتوسطة هذا لا بد من استيفاء المعايير النظامية.

Keywords: Akses, keadilan, pembangunan, pendidikan menengah

PENDAHULUAN

Pembangunan dan pengembangan pendidikan menengah merupakan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) setelah implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun berjalan lancar. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan baik lokal, nasional, maupun internasional. Modernitas saat ini juga memerlukan SDM yang berkualitas, bahkan menjadi faktor determinan bagi kemajuan sebuah bangsa¹ Pembangunan pendidikan masih menjadi salah satu fokus dalam pembangunan Indonesia sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peran pendidikan sekolah dapat memberi penguatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.²

Terkait daya saing sumber daya manusia (SDM), Indonesia dalam kancan dunia masih relatif tertinggal. *The Global Competitiveness Report 2011-2012* (laporan daya saing global tahun 2011-2012) yang dibuat oleh *World Economic Forum* (WEF) menempatkan Indonesia pada posisi ke 46 dari 142 negara di dunia. Pada kawasan ASEAN posisi daya saing Indonesia berada posisi keempat di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand³ (Supardi, 2013). Ketertinggalan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga disampaikan *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2012 yakni *Human Development Index* (HDI) Indonesia berada pada peringkat 124 dari 184 negara. HDI mengukur 3 komponen pembangunan yaitu: pendidikan, ekonomi dan kesehatan. *Human Development Index* (HDI) Indonesia tersebut mencerminkan pembangunan pendidikan dan kualitas SDM Indonesia yang berada pada posisi 124 tergolong *low human development*.⁴

Dalam rangka meningkatkan daya saing SDM, Indonesia mencanangkan pembangunan pendidikan menengah dan pendidikan vokasi yang diproyeksikan dengan 4 strategi. *Pertama*, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi. *Kedua*, pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk

¹ Sumardjoko & Prasetyo, "Pengembangan Profesionalisme Guru SMA, MA, dan SMK Muhammadiyah Sukoharjo Jawa Tengah", *Varia Pendidikan Volume 28, Nomor 1* (Juni 2016), 77-89.

² Miarsih. *Kajian Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak*. (Semarang: UNDIP, 2009).

³ Supardi. "Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi", *Jurnal Formatif*. Volume 2, nomor 2 (Mei 2013), 111-121.

⁴ Okprina, "Strategi Komunikasi Pengawas Pendidikan Menengah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik", *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Volume 4 Nomor 4 (Desember 2014), 108-121.

menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan. *Ketiga*, harmonisasi dan sinergi antara pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan ketrampilan. *Keempat*, memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja. Pembangunan pendidikan menengah merupakan salah satu agenda penting pembangunan untuk mendukung peningkatan daya saing SDM.⁵

Adapun kegelisahan akademik dalam penelitian ini adalah tidak meratanya akses pendidikan SMA di Kabupaten Pati dengan kondisi geografis wilayah yang berupa daerah pesisir pantai, daerah kepulauan dan daerah pegunungan. Ada dua aspek yang saling terkait dengan permasalahan tersebut yaitu 1) aspek pemerataan aksesibilitas pendidikan, dan 2) aspek pemerataan aksesibilitas spasial, dimana kedua aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap rendahnya akses layanan pendidikan secara merata dan bermutu. Dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pemerataan akses pendidikan sekolah menengah pertama di daerah pedesaan di Kabupaten Pati?. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan tentang konsep pemerataan akses pendidikan sekolah menengah pertama di daerah pedesaan di Kabupaten Pati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Analisa data menggunakan analisis deskriptif. Ada beberapa rumus yang digunakan terkait analisis deskriptif.

Analisis prioritas kawasan pembangunan prasarana pendidikan menengah

$$NRP = \frac{PPm}{PPk}$$

NRP = Nilai ratio proporsi

PPm = Proporsi pendidikan menengah

PPk = Proporsi penduduk kecamatan

Kriteria evaluasi: semakin kecil nilai ratio proporsi, semakin tinggi prioritas pembangunan

⁵Nina, "Rancang Bangun Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia", *Info Kajian Bappenas*, Volume 8, Nomor 2 (Juni 2011), 1-5

Analisis Pemilihan lokasi pembangunan pendidikan menengah

$$\text{Gravity Centre} = \quad : X = \frac{\sum P_i \cdot X_i}{\sum P_i} \quad , \quad Y = \frac{\sum P_i \cdot Y_i}{\sum P_i}$$

dimana: X_i dan Y_i adalah letak lokasi desa yang digambarkan dengan koordinat

P_i adalah penduduk desa yang menjadi opsi /alternatif pemilihan lokasi

KAJIAN TEORI

Pembangunan Pendidikan Menengah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Sesuai dengan definisi tersebut pendidikan memiliki arah pengembangan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan ketrampilan.⁶

Pendidikan menengah menurut PP 66 tahun 2010 adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Kedua, Madrasah Aliyah (MA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Ketiga, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui setara SMP atau MTs. Keempat, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui setara SMP atau MTs.⁷

Pembangunan Pendidikan merupakan suatu "investasi". Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (daya intelektual) maupun daya emosional (perasaan) yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya.⁸ Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa jangka panjang pendidikan akan memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Pendidikan merupakan komponen penting dan vital terhadap pembangunan terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan input bagi total produksi. Pendidikan merupakan indikator pengembangan suatu wilayah.⁹

Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berorientasi Keadilan

Pendidikan nasional diciptakan untuk menjadi kekuatan yang menentukan dalam membangun bangsa berdasarkan cita-cita berbangsa sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan pembangunan pendidikan menengah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan manajemen pendidikan menengah dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dari kabupaten/kota ke provinsi mulai tahun 2016. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkeadilan dan pemerataan akses pendidikan menengah melalui pemerataan pembangunan prasarana.¹⁰ Pendidikan menengah menurut Permendiknas 24 Tahun 2007 adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Namun Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang masuk ranah UU tersebut hanya terbatas pada SMA dan SMK. Sementara Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan masih berada pada kewenangan Kementerian Agama.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112.

⁸ Winarsih, "Kinerja Pendidikan Menengah di Indonesia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Kependidikan*, Volume 2, Nomor. 2 (Nopember 2014), 163-181

⁹ Sirojuzilam, *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional: Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Bangsa, 2008.

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.

Pembangunan fasilitas atau prasarana pendidikan menengah (SMA dan SMK) termasuk dalam fasilitas sosial yang merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk di suatu wilayah.¹¹ Pembangunan prasarana pendidikan menengah yang merata akan memiliki dampak pada perluasan akses pendidikan masyarakat. “Prasarana” adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Permendiknas 24 Tahun 2007 mengatur mengenai standar prasarana pendidikan menengah. Satu sekolah menengah (SMA, MA, SMK atau MAK) memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.¹²

Pembangunan prasarana pendidikan menengah yang berorientasi keadilan akan berdampak pada optimalisasi akses pendidikan menengah. Keadilan distributif sering digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Di sini tampak jelas bahwa tanggung jawab negara terhadap rakyat dinilai lebih besar dibandingkan dengan rakyat terhadap negara. Oleh karena itu, negara harus mendistribusikan sumber daya yang dikuasai kepada rakyat secara adil. Pada batas ini prinsip keadilan distributif memang lebih menonjol diterapkan. Namun begitu peran serta masyarakat dalam pembangunan juga sangat penting untuk menopang pembangunan pendidikan.¹³

Selain keadilan pembangunan pendidikan menengah, optimalisasi akses terhadap pelayanan pendidikan juga sangat penting. Kebijakan pembangunan pendidikan menengah berorientasi optimalisasi akses umumnya dimulai sejak pemilihan lokasi pembangunan. Satu diantara teori yang sangat populer dalam pemilihan lokasi pembangunan pendidikan adalah teori “*Centrality Centre*”. Konsep “*Centrality*” sering muncul dalam analisis jaringan dan semua pengukuran “*Centrality*” mencermati simpul-simpul dalam struktur jaringan.¹⁴

¹¹ Henlita & Handayani, “Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Teknik Pomits*. Vol. 2, No. 2 (November 2013), 197-202.

¹² Darmawan “Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan”, *Jurnal Pelopor Pendidikan*, Volume 6, Nomor 2 (November, 2014), 93-102

¹³ Faturochman, Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi. *Buletin Psikologi*. Volume 7, Nomor 1 (Mei 1999), 13-27.

¹⁴ Borgatti & Everett, “A Graph Theoretic Perspective on Centrality”, *Social Networks*, Volume 28 No 2 (November 2006), 466-484.

Fungsionalitas kota dalam bidang sosial dan ekonomi dalam suatu fungsi wilayah banyak bergantung pada level centralitas kota dalam wilayah.¹⁵ Peran penting wilayah dapat diilustrasikan melalui penyediaan barang dan jasa yang disediakan bagi area sekitar.¹⁶ Namun bagian terpenting peran central suatu kota tumbuh merupakan realita pusat wilayah sekitar.¹⁷

Gunamendukungperankotaatauwilayahdalam pembangunan, Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan termasuk pembangunan pendidikan, baik perseorangan maupun secara kelompok, karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, ada tiga alasan utama partisipasi masyarakat bersifat sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, tanpa adanya partisipasi program-program pendidikan akan gagal. *Kedua* bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pendidikan jika masyarakat dilibatkan dalam proses persiapan perencanaannya, pelaksanaan, sampai evalusia program pendidikan, karena mereka akan me-ngetahui secara mendasar bagaimana prog-ram-program pendidikan yang dilaksanakan. *Ketiga*, partisipasi menjadi penting dalam pembangunan pendidikan karena ada anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pendidikan. masyarakat memiliki hak untuk menentukan ide dan saran dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan.¹⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi dan Distribusi Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah menurut PP 66 (2010) adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

¹⁵ Abdullah, "Formulate Theoretical Model to Measure the Centrality of Cities", *International Journal of Humanities and Social Science* Volume 4, No. 4 (Desember 2014), 93-100.

¹⁶ Fellmann, Arther dan Judith, 2008. *Human Geography Landscape of Human Activities*, New York : McGraw-Hill, 2008.

¹⁷ Ayasra, *Regional Planning Theoretical and Practical Study*. Aman: Hammed Press, 2009.

¹⁸ Sulasikin, Dwiningrum & Sumarno, "Tuan Guru Sebagai Tokoh Pembangunan Pendidikan di Pedesaan" *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Volume 3, No 1 (Mei 2015), 1-10.

Kabupaten Pati memiliki 27 SMA (negeri dan Swasta), 31 SMK (negeri dan Swasta), dan 56 MA (negeri dan Swasta). Daerah ini tidak memiliki Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Secara komposit daerah ini memiliki pendidikan menengah sebanyak 114 sekolah. Distribusi pendidikan menengah di Kabupaten Pati ditunjukkan tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Eksistensi dan Distribusi Pendidikan Menengah di Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Pendidikan Menengah			Jumlah Sekolah	Proporsi (%)
		SMA	SMK	MA		
1	Sukolilo	1	1	3	5	4,39
2	Kayen	5	2	5	12	10,53
3	Tambakromo	0	0	1	1	0,88
4	Winong	0	1	3	4	3,51
5	Pucakwangi	0	0	3	3	2,63
6	Jaken	0	0	1	1	0,88
7	Batangan	1	0	0	1	0,88
8	Juwana	2	2	1	5	4,39
9	Jakenan	1	0	0	1	0,88
10	Pati	10	10	2	22	19,30
11	Gabus	1	2	1	4	3,51
12	Margorejo	1	1	2	4	3,51
13	Gembong	1	2	5	8	7,02
14	Tlogowungu	0	0	3	3	2,63
15	Wedarijaksa	0	0	3	3	2,63
16	Trangkil	0	0	5	5	4,39
17	Margoyoso	1	4	8	13	11,40
18	Gunungwungkal	0	0	1	1	0,88
19	Cluwak	0	1	2	3	2,63
20	Tayu	2	2	4	8	7,02
21	Dukuhseti	1	3	3	7	6,14
Kabupaten Pati		27	31	56	114	100,00

(Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2016)

Kawasan yang memiliki prasarana pendidikan menengah terbanyak berada di kecamatan Pati (22 sekolah), Margoyoso (13 sekolah) dan Kayen (12 sekolah). Sebaliknya kawasan yang memiliki prasarana pendidikan menengah paling sedikit berada di 5 kawasan masing-masing 1 sekolah yaitu: Kecamatan Tambakromo, Jaken, Batangan, Jakenan dan Kecamatan Gunungwungkal. Ini berarti lima kawasan ini merupakan potensi lokasi pembangunan prasarana

pendidikan menengah di daerah tersebut. Pemilihan kawasan prioritas pembangunan prasarana pendidikan menengah mempertimbangkan 2 komponen yaitu: eksistensi prasarana pendidikan menengah dan eksistensi penduduk.

Pemilihan Kawasan Pembangunan Pendidikan Menengah Berbasis Keadilan

Pelayanan pendidikan yang berorientasi keadilan berkait erat dengan eksistensi penduduk. Pengertian “penduduk” adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu (UU No 10 Tahun 1992). Tahun 2015 Kabupaten Pati memiliki penduduk sebanyak 1.265.286 orang.

Pemilihan kawasan prioritas pembangunan prasarana pendidikan menengah mempertimbangkan 2 komponen yaitu: eksistensi prasarana pendidikan menengah dan eksistensi penduduk. Nilai ratio proporsi prasarana pendidikan menengah terhadap proporsi penduduk merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan prasarana pendidikan menengah. Semakin kecil nilai ratio, semakin tinggi tingkat prioritas pembangunan prasarana pendidikan menengah berorientasi pemerataan/keadilan. Prioritas pembangunan prasarana pendidikan menengah ditunjukkan tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Prioritas Kawasan Pembangunan Prasarana Pendidikan Menengah

NO	Kecamatan	Penduduk		Dikmen		Ratio S : P	Urutan Prioritas
		Jumlah	% (P)	Jumlah	% (S)		
1	Sukolilo	82.275	6,50	5	4,39	0,6754	9
2	Kayen	71.309	5,64	12	10,53	1,8670	18
3	Tambakromo	52.169	4,12	1	0,88	0,2136	1
4	Winong	60.397	4,77	4	3,51	0,7358	11
5	Pucakwangi	43.705	3,45	3	2,63	0,7623	14
6	Jaken	45.505	3,60	1	0,88	0,2444	3
7	Batangan	43.488	3,44	1	0,88	0,2558	4
8	Juwana	93.081	7,36	5	4,39	0,5965	7
9	Jakenan	46.839	3,70	1	0,88	0,2378	2
10	Pati	106.830	8,44	22	19,30	2,2867	21
11	Gabus	60.082	4,75	4	3,51	0,7389	12
12	Margorejo	59.098	4,67	4	3,51	0,7516	13
13	Gembong	45.556	3,60	8	7,02	1,9500	19

14	Tlogowungu	50.842	4,02	3	2,63	0,6542	8
15	Wedarijaksa	61.501	4,86	3	2,63	0,5412	6
16	Trangkil	60.473	4,78	5	4,39	0,7675	15
17	Margoyoso	72.315	5,72	13	11,40	3,8908	20
18	Gunungwungkal	37.085	2,93	1	0,88	0,2411	5
19	Cluwak	46.127	3,65	3	2,63	0,4817	10
20	Tayu	69.032	5,46	8	7,02	1,5429	16
21	Dukuhseti	57.577	4,55	7	6,14	1,2845	17
	Kabupaten Pati	1.265.286	100,00	114	100,00		

(Hasil analisis, 2017)

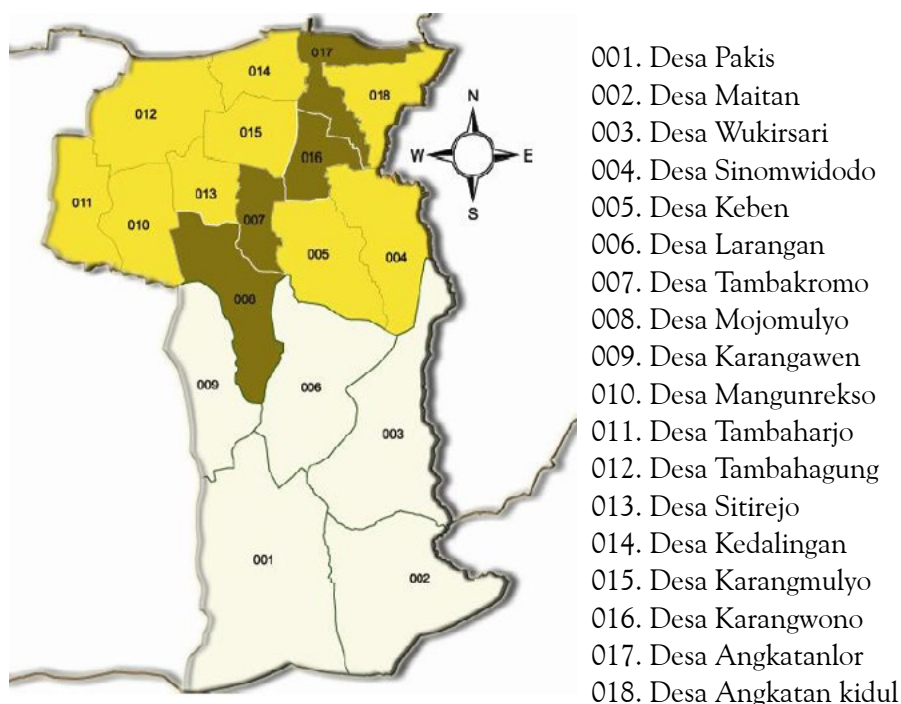
Ada 5 kawasan yang memiliki prasarana pendidikan menengah paling sedikit masing-masing 1 sekolah (0,88 %). Semakin kecil nilai ratio proporsi eksistensi prasarana pendidikan terhadap proporsi penduduk berarti semakin tinggi tingkat prioritasnya. Eksistensi prasarana pendidikan menengah setelah dilakukan komparasi dengan proporsi penduduk kawasan maka nilai ratio terkecil menjadi kawasan prioritas pembangunan pendidikan menengah. *Pertama*, Kecamatan Tambakromo dengan penduduk berjumlah 52.169 orang (4,12 %) maka ratio proporsi prasarana pendidikan menengah (0,88 %) terhadap proporsi penduduk sebesar 0,2136 (0,88 dibagi 4,12). *Kedua*, Kecamatan Jakenan dengan penduduk berjumlah 46.839 orang (3,70 %) maka ratio proporsi prasarana pendidikan menengah (0,88 %) terhadap proporsi penduduk sebesar 0,2378. *Ketiga*, Kecamatan Jaken dengan penduduk berjumlah 45.505 orang (3,60 %) maka ratio proporsi prasarana pendidikan menengah (0,88 %) terhadap proporsi penduduk sebesar 0,2444. *Keempat*, Kecamatan Batangan dengan penduduk berjumlah 43.488 orang (3,44 %) maka ratio proporsi prasarana pendidikan menengah (0,88 %) terhadap proporsi penduduk sebesar 0,2558. *Kelima*, Kecamatan Gunungwungkal dengan penduduk berjumlah 37.085 orang (2,93 %) maka ratio proporsi prasarana pendidikan menengah (0,88 %) terhadap proporsi penduduk sebesar 0,2411.

Analisis Lokasi Pembangunan Pendidikan Menengah Berorientasi Optimalisasi Akses

Pemilihan lokasi pembangunan prasarana pendidikan menengah berorientasi optimalisasi akses dapat dilakukan dengan menggunakan analisis "Centrality Centre". Berdasarkan uraian sebelumnya, prioritas pembangunan prasarana pendidikan menengah di area studi berada Kecamatan Tambakromo dengan penduduk berjumlah 52.169 orang (4,12 %) dan eksistensi prasarana pendidikan menengah hanya 1 sekolah (0,88 %). Nilai ratio proporsi prasarana pendidikan menengah (0,88 %) terhadap proporsi penduduk (4,12 %) sebesar

0,2136 dan nilai ratio ini paling kecil dibandingkan dengan ratio kawasan lain maka menjadi prioritas 1 pembangunan prasarana pembangunan pendidikan menengah. Kawasan prioritas pembangunan pendidikan menengah (Kecamatan Tambakromo) yang menjadi orientasi pembangunan ditindaklanjuti dengan pemilihan lokasi (lokasi desa) dengan melalui proses 4 tahapan dalam analisis “*Centrality Centre*”.

Pertama, identifikasi lokasi setiap desa di kawasan/kecamatan terpilih. Kecamatan Tambakromo memiliki 18 desa yang persebarannya ditunjukkan gambar di bawah ini.



Gambar 1. Peta Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati

Kedua, pilih desa pusat pemerintahan kawasan (ibu kota kecamatan) dan beberapa desa sekitarnya yang secara geografis berada di posisi agak tengah (*centre*) yang akan dianalisa lebih lanjut. Desa pusat pemerintahan kawasan (ibu kota kecamatan) secara umum memiliki daya dukung ketersediaan infrastruktur lebih baik seperti akses jalan, jaringan listrik dan lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan pendidikan. Kemudian desa - desa yang secara geografis berada di posisi tengah (*centre*) kawasan memiliki potensi jangkauan pelayanan yang optimal untuk semua desa di kawasan itu dan desa dari kawasan lainnya.

Pemilihan lokasi awal melalui cara tersebut relevan dengan teori pemilihan lokasi “*Centrality Centre*”. Ada 6 desa di Kecamatan Tambakromoyang berpotensi untuk dipilih menjadi lokasi pembangunan prasarana pendidikan menengah berorientasi optimalisasi akses dengan kode dan nama desa sebagai berikut (lihat peta diatas): (a) 005 Desa Keben; (b) 007 Desa Tambakromo; (c) 008 Desa Mojomulyo; (d) 013 Desa Sitirejo; (e) 015 Desa Karangmulyo; dan (f) 016 Desa Karangwono.

Ketiga, Desa-desa terpilih yang berpotensi untuk menjadi lokasi pembangunan prasarana pendidikan menengah diidentifikasi posisi koordinatnya dan jumlah penduduknya.

Keempat, masukkan nilai koordinat ($x_i ; y_i$) dan penduduk desa (P_i) ke dalam rumus (lihat rumus di atas) yang dapat ditunjukkan dalam tabel penolong dibawah ini.

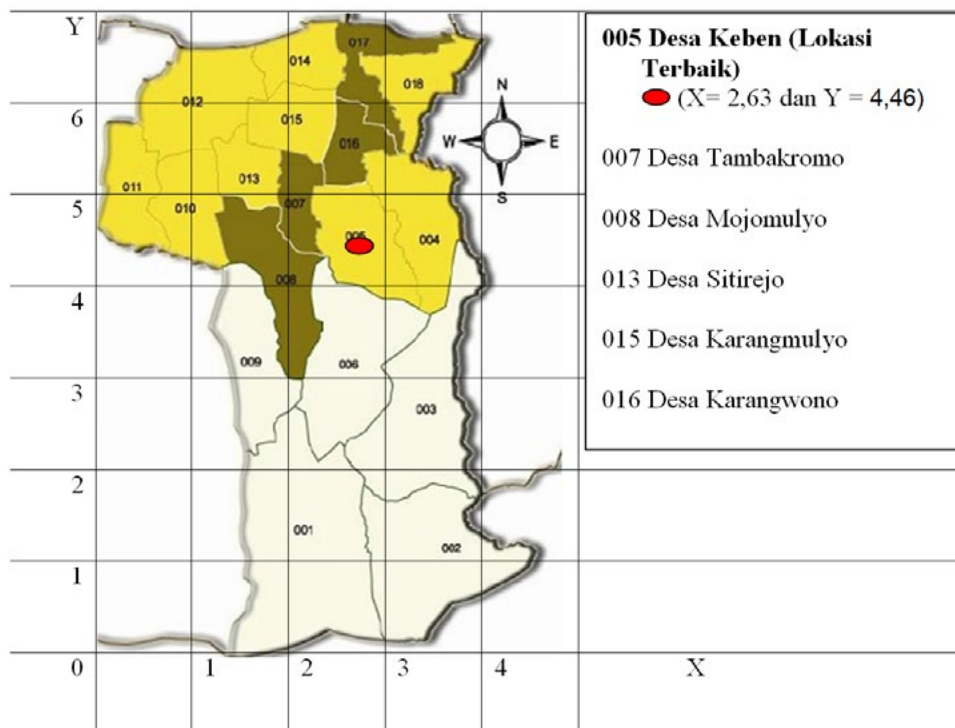
Kode dan Nama Desa	Koordinat		Penduduk	Pi x Xi	Pi x Yi
	Xi	Yi	Pi		
005 Desa Keben	2,5	4,5	3.510	8.775	15.795
007. Desa Tambakromo	2	5	4.136	8.272	20.680
008. Desa Mojomulyo	2	4	2.402	4.804	9.608
013. Desa Sitirejo	5,2	1,5	2.282	11.866	3.423
015. Desa Karangmulyo	2	6	1.546	3.092	9.276
016. Desa Karangwono	2,5	5,5	2.970	7.425	16.335
Jumlah	16,2	26,5	16.846	44.234	75.117

$$\text{Gravity Centre} = :X = \frac{\sum P_i \cdot X_i}{\sum P_i} \quad , \quad Y = \frac{\sum P_i \cdot Y_i}{\sum P_i}$$

$$X = 44.234 / 16.846 \quad Y = 75117 / 16846$$

$$X = 2,63 \quad Y = 4,46$$

Lokasi terbaik pembangunan prasarana pendidikan menengah untuk optimalisasi akses terletak pada lokasi dengan koordinat ($X= 2,63$ dan $Y = 4,46$) yaitu Desa Keben yang ditunjukkan gambar dibawah ini.



Gambar 3. Lokasi Pembangunan Prasarana Pendidikan Menengah

Secara normatif lokasi terbaik pembangunan prasarana pendidikan menengah untuk jangkauan akses optimal terletak pada koordinat ($X = 2,63$ dan $Y = 4,46$) yang berada di Desa Keben. Namun perlu disadari bahwa letak koordinat tersebut merupakan proxi lokasi yang bersifat relatif untuk disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan dan kelayakan teknis lahan yang diatur dalam Permendiknas 40 Tahun 2008 untuk SMK/MAK dan Permendiknas 24 Tahun 2007 mengatur mengenai standar prasarana pendidikan menengah (SMA /MA).

Permendiknas 40 Tahun 2008 mengatur bahwa satu SMK/MAK memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar. Ketentuan Lahan SMK meliputi: (1) Luas lahan minimum dapat menampung sarana dan prasarana untuk melayani 3 rombongan belajar; (2) Lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan, infrastruktur, tempat bermain/berolahraga / upacara, dan praktik; (3) Luas lahan efektif adalah seratus per tiga puluh ($100/30$) dikalikan luas lantai dasar bangunan ditambah infrastruktur, tempat bermain/berolahraga/upacara, dan luas lahan praktik; (4) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat; (5) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada

di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api, dan tidak menimbulkan potensi merusak sarana dan prasarana. Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik. Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut. Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Selanjutnya, Permendiknas 24 Tahun 2007 mengatur mengenai standar prasarana pendidikan menengah (SMA /MA). Luas lahan adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif. Lahan terhindar dari potensi bahaya. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%. Lahan terhindar dari gangguan: (1) Pencemaran air; (2) Kebisingan; dan (3) Pencemaran udara.

Aplikasi Model Kebijakan Pembangunan Pendidikan Menengah Bagi Propinsi

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan manajemen pendidikan menengah dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dari kabupaten/kota ke provinsi mulai tahun 2016 memiliki implikasi kebijakan pembangunan pendidikan menengah dilakukan oleh pemerintah propinsi.

Kebijakan pembangunan pendidikan menengah yang dilakukan oleh pemerintah propinsi memiliki 6 tahapan. *Pertama*, identifikasi ketersediaan SMAN dan SMKN setiap kabupaten /kota di propinsi tersebut. Kedua, konversi eksistensi pendidikan menengah dan jumlah penduduk tiap kabupaten /kota dalam proporsi (%). *Ketiga*, hitung ratio proporsi pendidikan menengah terhadap proporsi penduduk kabupaten /kota di propinsi tersebut. Semakin kecil nilai ratio dari kabupaten /kota, semakin tinggi tingkat prioritas pembangunan pendidikan menengah. *Keempat*, setelah terpilih daerah (kabupaten /kota) sebagai lokasi pembangunan pendidikan menengah, maka pilih kecamatan di daerah itu yang memiliki ratio terkecil dari proporsi pendidikan menengah terhadap proporsi penduduk (lihat uraian di atas). *Kelima*, pilih desa yang paling optimal untuk akses pendidikan menengah dengan menggunakan teori yang dianut diantaranya "Centrality Centre". *Keenam*, pilih lahan di lokasi yang memenuhi standar normatif peraturan, Permendiknas 40 Tahun 2008 untuk SMK/MAK dan Permendiknas 24 Tahun 2007 untuk SMA /MA.

PENUTUP

Pembangunan pendidikan menengah sangat penting untuk mendukung daya saing sumberdaya manusia. Relevan dengan tujuan penelitian, ada 3 temuan utama dalam studi ini. Pertama, eksistensi dan distribusi pembangunan pendidikan menengah di area studi relatif kurang merata. Kedua, kawasan yang menjadi prioritas pembangunan pendidikan menengah berorientasi keadilan adalah kawasan yang memiliki nilai ratio terkecil dari proporsi eksistensi pendidikan menengah terhadap proporsi penduduk. Ketiga, lokasi yang paling potensial untuk pembangunan pendidikan menengah yang berorientasi optimalisasi akses adalah lokasi tengah (*centre*) yang mempertimbangkan faktor geografis dan penduduk.

Namun pemilihan lahan untuk lokasi pembangunan pendidikan menengah harus memenuhi standar normatif peraturan yaitu: (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Standar Sarana dan Prasana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan; dan atau (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasana untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nashwan Shukri. Formulate Theoretical Model to Measure the Centrality of Cities. *International Journal of Humanities and Social Science* Volume 4, No. 4 (Desember 2014), 93-100.
- Ayasra, Muhammad. 2009. Regional Planning Theoretical and Practical Study. Aman: Hammed Press, 2009.
- Borgatti, S.P. & Everett, M.G, "A Graph Theoretic Perspective on Centrality", *Social Networks*, Volume 28 No 2 (November 2006), 466–484.
- Darmawan "Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan", *Jurnal Pelopor Pendidikan*, Volume 6, Nomor 2 (November 2014), 93-102.
- Faturochman, Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi. *Buletin Psikologi*. Volume 7, Nomor 1 (Mei 1999), 13-27.
- Fellmann, Jerome D., Arther ,Geties., Judith, Geties, *Human Geography Landscape of Human Activities*, New York : McGraw-Hill, 2008.
- Henlita & Handayani , "Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Teknik Pomits*. Vol. 2, No. 2 (November 2013), Pp. 197-202.
- Miarsih. *Kajian Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak*. (Semarang: UNDIP, 2009).
- Nina, "Rancang Bangun Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia", *Info Kajian Bappenas*, Volume 8, Nomor 2 (Juni 2011), 1-5.
- Okprina, "Strategi Komunikasi Pengawas Pendidikan Menengah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik", *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Volume 4 Nomor 4 (Desember 2014), 108-121.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang
- Standar Standar Sarana dan Prasana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2010.
- Sulasikin, Dwiningrum & Sumarno, "Tuan Guru Sebagai Tokoh Pembangunan Pendidikan di Pedesaan" *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Volume 3, No 1 (Mei 2015), Pp. 1-10.
- Sirojuzilam, *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional : Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Medan : Pustaka Bangsa, 2008.
- Surakhmad, W., *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Sumardjoko & Prasetyo, "Pengembangan Profesionalisme Guru SMA, MA, dan SMK Muhammadiyah Sukoharjo Jawa Tengah", *Varia Pendidikan* Volume 28, Nomor 1 (Juni 2016),. 77-89.
- Supardi, "Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi", *Jurnal Formatif* .Volume 2, nomor 2 (November 2013), Pp 111-121.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Kemenkum dan HAM, 2003
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemenkum dan HAM, 2014.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: Kemenkum dan HAM, 1992
- Winarsih, "Kinerja Pendidikan Menengah di Indonesia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Kependidikan*, Volume 2, Nomor. 2 (Nopember 2014), 163-181